

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Peran

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Nurmahdalena, 2016) peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan, pendapat dari Riyadi dalam (Lantaeda dkk., 2017.) peran dapat didefinisikan sebagai arah dan ide dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, pelaku baik individu maupun organisasi, akan berperilaku sesuai dengan harapan orang lain atau lingkungannya. Lebih lanjut lagi Gibson Ivancevich dan Donnelly dalam (Solahudin dkk, 2022) menyebutkan bahwa peran merupakan individu yang memiliki hubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya berupa organisasi.

Syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto dalam (Nurmahdalena, 2016) mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peranan adalah aturan yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran adalah rangkaian aturan yang membantu seseorang hidup dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah gagasan tentang bagaimana seseorang dapat berperilaku dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga merupakan suatu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial di masyarakat.

Sutarto dalam (Lantaeda dkk., 2017.) menyebutkan tiga komponen peran, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yakni adanya kepercayaan dari seseorang mengenai apa yang dilakukan pada situasi tertentu.

- 2) Harapan peran, yakni adanya harapan dari orang lain berkenaan dengan seseorang yang menempati posisi tertentu mengenai bagaimana ia bertindak seharusnya.
- 3) Pelaksanaan peran, yakni adanya perilaku yang sebenarnya dari seseorang yang berada dalam suatu posisi tertentu. Ketiga komponen ini harus selaras supaya dapat terjalin kelanjutan dan kelancaran dari interaksi sosial.

Selain itu, terdapat tiga pembagian peran menurut Soekanto dalam (Lantaeda dkk., 2017), yaitu:

- 1) Peran aktif, peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan posisi mereka sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus dan pejabat.
- 2) Peran partisipatif, yakni peran yang diberikan oleh anggota kelompok yang memberikan bantuan yang berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran pasif, yakni sumbangan anggota yang pasif, di mana anggota menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan hal-hal yang sama untuk kelompok. Ini memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik.

Ada beberapa peran penyuluh KB, menurut (Andarwulan & Latifah, 2023.) peran tersebut diantaranya:

- 1) Penyuluh KB sebagai ujung tombak dalam program KB. Hal ini dikarenakan penyuluh berinteraksi secara langsung dengan masyarakat di lapangan.
- 2) Sebagai pengelola pelaksana program KB
- 3) Sebagai penggerak masyarakat, melibatkan lembaga dan pemerintah untuk membantu mensukseskan program.

Lebih lanjut lagi, tambahan peran lainnya menurut (Nurmahdalena, 2016) ialah peran penyuluh keluarga berencana adalah sebagai pemberdaya masyarakat serta sebagai pengembang kemitraan dalam program KB. Berdasarkan Pendapat Ife dalam (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014) konsep peran *community worker* dalam pelaku perubahan (*agent of change*) pada

petugas lapangan keluarga berencana harus bisa memiliki keterampilan sebagai berikut:

1) Keterampilan fasilitatif

Merupakan seseorang yang perlu mempunyai peran sebagai pelaku perubah sosial, memberikan kesempatan negosiasi dan mediasi, memberikan dukungan, membangun konsensus atau membangun kesepakatan, memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan, memfasilitasi masyarakat atau kelompok, serta mengatur dan mengalokasikan sumber daya kepada masyarakat.

2) Keterampilan edukasional

Mempunyai peran untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, melatih dan memberikan informasi.

3) Keterampilan perwakilan

Mempunyai peran untuk mencari sumber daya, memanfaatkan media, menghubungkan masyarakat, serta mengembangkan jaringan mitra.

4) Keterampilan teknis

Keterampilan untuk menggunakan teknologi, memberikan presentasi dan mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan suatu program.

2.1.2 Kampung keluarga berkualitas

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

2.1.3.1 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi memiliki arti yang sebanding dengan keterlibatan, saling mengerti, mengkaji, serta merencanakan tindakan oleh anggota masyarakat (Bahua, 2018). Sedangkan menurut Asngari (2001) dalam (Bahua, 2018) menyebutkan bahwa pembentukan partisipasi harus berdasarkan adanya pemahaman bersama dan dengan adanya saling pengertian yang disebabkan oleh komunikasi dan berinteraksi antar sesama.

Menurut Sumardi (2010) dalam (Rizal, 2014) Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk penyampaian pendapat maupun dalam bentuk kegiatan, melalui pemberian pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan/atau materi,

serta keterlibatan dalam pemanfaatan dan penikmatan hasil-hasil pembangunan.

Dalam pendapat lain, Notoatmodjo (2004) dalam (Hutagalung, 2022) menyebutkan bahwa dalam berpartisipasi setiap anggota masyarakat dipaksa untuk bisa berkontribusi atau menyumbangkan sesuatu. Kontribusi disini tidak hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi juga berupa kompetensi dan ide. Partisipasi bisa berbentuk 4M yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mendukung suatu pencapaian tujuan melalui proses penyusunan ketetapan, pelaksanaan program serta evaluasi program. Ralph Linton & Ngadijono dalam (Hutagalung, 2022, hlm. 30) masyarakat adalah sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama untuk waktu yang lama bekerjasama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai sebuah unit sosial dengan batas-batas tertentu. Ralph Linton juga menyebutkan bahwa masyarakat muncul dari setiap kumpulan orang yang telah lama hidup dan bekerjasama. Dalam waktu yang lama, kelompok manusia yang belum terorganisir mengalami proses, seperti:

- 1) Adanya proses adaptasi antar sesama anggota kelompok.
- 2) Proses organisasi ke dalam.
- 3) Terdapat proses terbentuknya perasaan kelompok atau semangat kelompok yang terbentuk secara bertahap.

Sejalan dengan hal itu, maka partisipasi masyarakat menurut pendapat Siagian (Rahman, 2016) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah mereka yang melakukan berbagai jenis pembangunan, dimana orang-orang pada akhirnya berfungsi sebagai subjek dan objek pembangunan. Secara umum menurut Sutrisno dalam (Hutagalung, 2022) terdapat dua jenis definisi partisipasi dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti bahwa masyarakat

mendukung rencana atau proyek pembangunan yang dibuat oleh para perencana dan memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, tingkat tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam definisi ini diukur dengan fakta bahwa masyarakat juga bertanggung jawab atas biaya pembangunan, baik dalam bentuk uang maupun tenaga dalam melakukan pembangunan.

- 2) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama erat antara perencana dan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Tidak hanya diukur dengan keinginan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dari tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan jalan dan tujuan pembangunan.

Menurut Nasdian dalam (Siti & Azis, 2017) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses aktif dimana masyarakat mengambil inisiatif, dipandu oleh pemikiran mereka sendiri, dan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) yang memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol yang efektif. Menurut definisi ini, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola potensi mereka sendiri. Proses bertingkat dimana komunitas diberi kekuasaan untuk memperoleh kontrol lebih besar atas hidup mereka sendiri dikenal sebagai partisipasi komunitas dalam pengembangan masyarakat.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan seseorang dalam kegiatan kelompok atau program dengan memberikan dukungan dan tenaga, baik materi ataupun waktu untuk bisa berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tentunya ikut andil dalam proses aktualisasinya serta menikmati hasil dari sebuah pembangunan, program atau kegiatan tersebut.

2.1.3.2 Bentuk (Tahap) Partisipasi masyarakat

Pada dasarnya, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya berlaku pada keterlibatan secara fisik atau sumbangan tenaga saja, namun ada banyak bentuk keterlibatan pada setiap proses pembangunan atau program.

(Hutagalung, 2022) Bentuk partisipasi terbagi menjadi dua tahap, yakni partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal merupakan suatu kondisi partisipasi dimana masyarakat ikut berperan atau mengambil bagian program dari pihak lain, dalam hubungannya masyarakat berada sebagai bawahan, pengikut atau pelanggan. Sedangkan, partisipasi horizontal ialah dimana setiap kelompok atau anggota masyarakat terlibat dalam inisiatif dimana mereka berinteraksi horizontal satu sama lain. Partisipasi seperti ini menunjukkan awal perkembangan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri.

Ndraha dalam (Siti & Azis, 2017) menyebutkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu titik awal perubahan sosial adalah berpartisipasi dan berinteraksi dengan orang lain.
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap, dan menanggapi informasi. Ini dapat mencakup menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), menerima dengan syarat, atau menolaknya.
- 3) Partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan dan pengoprasian pembangunan.
- 5) Berpartisipasi dalam mengambil, menjaga, dan mengembangkan hasil pembangunan.
- 6) Partisipasi dalam evaluasi pembangunan, yakni partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi seberapa baik pembangunan dijalankan sesuai dengan rencana dan seberapa baik hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, menurut Yadav dalam (Hutagalung, 2022) menyebutkan ada beberapa macam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam masyarakat harus bisa ditumbuhkan melalui adanya forum pembahasan yang memungkinkan masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat bisa berpartisipasi dengan cara memberikan

saran, kritik, ataupun usulan mengenai suatu program atau pembangunan.

2) Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam hal ini masyarakat bisa berpartisipasi dengan cara memberikan tenaga, uang, material ataupun barang yang dapat mendukung pelaksanaan program atau pembangunan.

3) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Tahap ini masyarakat bisa terlibat baik berupa tenaga maupun dana yang dapat menjaga dan memelihara program atau pembangunan supaya bisa tetap berjalan.

Secara singkat, tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam (Hutagalung, 2022) dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Tahapan Partisipasi

Tahap	Deskripsi
Pengambilan keputusan	Penentuan Alternatif dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan tentang berbagai ide atau hal- hal yang bermanfaat bagi semua
Pelaksanaan	Menggerakkan sumber daya dan dana selama pelaksanaan program yang merupakan faktor penting dalam keberhasilannya.
Pengambilan manfaat	Partisipasi terkait dengan kualitas dan jumlah hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.

Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui bagaimana program dijalankan serta bisa dikembangkan supaya lebih baik lagi kedepannya.
----------	---

2.1.3.3 Pendekatan dan Syarat terjadinya Partisipasi Masyarakat

Menurut Club du Saheldan Mikkelsen dalam (Hutagalung, 2022) terdapat beberapa pendekatan untuk meningkatkan partisipasi, diantaranya:

1) Pendekatan Pasif, pelatihan dan informasi

Pendekatan ini memiliki pendapat bahwa pihak luar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang lebih besar daripada pihak dalam. Dengan demikian partisipasi ini adalah dengan memfasilitasi komunikasi satu arah dari atas ke bawah, dan hubungan dengan masyarakat dan pihak eksternal bersifat vertikal.

2) Pendekatan partisipasi aktif

Pada pendekatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut andil secara langsung dan lebih intens dengan para petugas eksternal.

3) Pendekatan partisipasi dengan keterikatan

Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk ikut dalam melakukan pembangunan serta diberikan pilihan untuk bergabung pada kegiatan dan memiliki tanggung jawab atas kegiatan tersebut.

4) Pendekatan dengan partisipasi setempat

Pendekatan dengan menggambarkan kegiatan pembangunan berdasarkan keputusan masyarakat setempat.

Terdapat kebebasan untuk ikut berpartisipasi, dimana adanya hal ini Dari pendekatan diatas, terdapat beberapa syarat supaya terjadinya partisipasi masyarakat, diantaranya menurut penelitian yang dilakukan oleh (Zulham, *et al*, 2022) mengemukakan bahwa syarat terjadinya partisipasi adalah sebagai berikut:

1) Memungkinkan untuk setiap anggota masyarakat bisa ikut

berpartisipasi dalam semua kegiatan.

- 2) Adanya kemampuan untuk berpartisipasi, dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat serta keikutsertaannya bisa melahirkan gagasan dan saran yang berguna bagi sebuah program atau pembangunan, selain itu, kemampuan berpartisipasi ini berkaitan dengan kemampuan partisipasi fisik maupun non fisik.
- 3) Adanya kemauan dan keinginan yang muncul dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi, dengan catatan jika seseorang mampu berpartisipasi namun tidak ada kemauan dalam dirinya, maka hal tersebut tidak bisa disebut dengan partisipasi.

2.1.3.4 Indikator Partisipasi Masyarakat

Marschall (2006) dalam (Rahmawati, Ansyari, & Nuryanti, 2021) menyebutkan ada tiga indikator partisipasi, yaitu:

- 1) Terdapat kelompok yang bisa menampung partisipasi masyarakat.
- 2) Kemampuan dari masyarakat yang ikut dalam proses partisipasi.
- 3) Dalam proses pengambilan keputusan, adanya masyarakat yang ikut untuk menyampaikan suatu pendapat.

Sedangkan, ada lima indikator partisipasi menurut Oakley (1991) dalam (Rahmawati, Ansyari, & Nuryanti, 2021), yakni: (1) Adanya peran, (2) Adanya mobilisasi, (3) Adanya peran dan aksi masyarakat, (4) Adanya motivasi dari masyarakat, (5) Adanya tanggung jawab dari masyarakat. Lebih lanjut lagi, (Hutagalung, 2022) menyebutkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan partisipasi yaitu tingkatan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan harus dipahami dengan benar. Wilcox dalam (Hutagalung, 2022) menyebutkan terdapat lima tingkatan partisipasi, yaitu:

- 1) *Information* (informasi)

Yakni, memberikan suatu informasi mengenai program-program kampung KB

2) *Consultation* (konsultasi)

Memberi usulan mengenai pendapat, menjadi pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, namun tidak berpartisipasi dalam penerapan ide dan gagasan tersebut.

3) *Deciding Together* (Pengambilan Keputusan Bersama)

Dalam hal ini, dengan mendukung ide, konsep, dan pilihan serta memberikan peluang untuk pengambilan keputusan.

4) *Acting Together* (Bertindak Bersama)

Dengan kata lain, dia tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berkolaborasi dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya.

5) *Supporting independent community interest* (Memberikan dukungan)

Dalam hal ini, kelompok lokal memberikan dana, saran, dan bantuan lainnya untuk menyusun jadwal kegiatan.

Peter Oakley (Dwiningrum, 2011) dalam (Hutagalung, 2022) menggambarkan partisipasi kedalam tujuh tingkatan yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Partisipasi

Tingkatan	Deskripsi
<i>Manipulation</i>	Pada tahap ini terjadi mengarah pada pendoktrinan, dan merupakan tingkatan paling rendah mendekati situasi tidak adanya partisipasi.
<i>Consultation</i>	Pemangku kepentingan mempunyai kesempatan dalam memberikan pertimbangan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

<i>Consensus Building</i>	Dalam tahap ini, pemangku kebijakan saling berinteraksi bernegosiasi, dan toleransi, untuk bisa memahami seluruh anggota kelompok. Kelemahan disini ialah anggota kelompok atau masyarakat lebih memiliki sifat diam dan mengikuti arahan atau bersifat pasif.
<i>Decision Making</i>	Kesepakatan ini terjadinya karena keputusan kolektif dan rasa tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Pada tahap ini, negosiasi menunjukkan tingkat perbedaan yang terjadi baik dalam individu maupun kelompok.
<i>Risk-taking</i>	Pada tahap ini semua yang terlibat memikirkan resiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Pada saat ini juga tidak hanya menghasilkan suatu keputusan, tapi juga memikirkan keuntungan, hambatan serta keterkaitan. Maka dari itu, akuntabilitas menjadi dasar yang penting.
<i>Partnership</i>	Perlu adanya kerja sama antar satu sama lain yang tidak hanya dalam bentuk struktur, tetapi juga dalam fungsi dan tanggung jawab.
<i>Selfmanagement</i>	Dalam tahap ini merupakan puncak dari partisipasi masyarakat, dimana para pemangku kepentingan bisa berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal yang menjadi perhatian.

Indikator-indikator partisipasi tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau program masyarakat.

2.1.3.5 Faktor Pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat

partisipasi masyarakat, Menurut (Wastiti, Purnaweni, dan Rahman, 2021) faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor pendorong partisipasi masyarakat

1) Adanya kesempatan

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi ketika mereka mempunyai peluang. Salah satu hal yang mendasari disini adalah peran pemerintah untuk bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan termasuk pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pemeliharaan dan pemanfaatan.

2) Adanya Kemauan

Dengan adanya kemauan, masyarakat menjadi termotivasi dan menumbuhkan minat mereka untuk berpartisipasi. Kemauan juga merupakan salah satu pemrakarsa dalam mendorong partisipasi masyarakat.

3) Adanya kemampuan

Adanya kemampuan dari masyarakat seperti kemampuan untuk menemukan dan memahami peluang, kemampuan untuk mengerjakan tugas atau kegiatan. Selain itu ada juga kemampuan untuk meluangkan waktu dan ikut terlibat dalam sebuah pembangunan.

b. Faktor penghambat partisipasi masyarakat

Faktor penghambat merupakan faktor negatif yang dapat mengganggu jalannya partisipasi masyarakat, (Wastiti, Purnaweni, dan Rahman, 2021) menyebutkan ada beberapa faktor penghambat partisipasi, yakni:

1) Adanya sifat individualis

Berkaitan dengan pola pikir yang egois terhadap pembangunan atau program yang ada, terdapat sikap masyarakat seperti malas, acuh tak acuh, dan tidak mau melakukan perubahan di masyarakat.

2) Demografis

Menurut Angel & Ulya (2018) dalam (Wastiti, Purnaweni, dan

Rahman, 2021) menuturkan ada beberapa faktor dari demografi sosial yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Faktor usia menjadi salah satu faktor dalam keaktifan seseorang untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, usia yang lebih tua akan sering memberikan pendapat dikarenakan ada anggapan usia tua lebih mempunyai banyak pengalaman. Dalam faktor jenis kelamin, adanya sistem pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat, partisipasi pria dan wanita dalam pembangunan. Sistem pelapisan sosial ini menyebabkan perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Selanjutnya, dalam faktor pendidikan, Faktor pendidikan dianggap penting karena pendidikan membantu seseorang menjadi lebih cepat tanggap terhadap kemajuan teknologi dan komunikasi, serta membangun pemahaman yang luas tentang pembangunan, bentuk, dan tata cara peran yang diberikan.

3) Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi, dikarenakan masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari daripada harus ikut berpartisipasi. Faktor ekonomi yang kurang juga dapat menyebabkan masyarakat tidak bisa ikut berpartisipasi dalam partisipasi yang berupa dana/ sumbangan.

Sedangkan, menurut (Nurbaiti dan Bambang 2017) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, etnis, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan, jarak rumah dari tempat aktivitas atau pekerjaan, dan kepemilikan tanah. Sedangkan faktor eksternal adalah semua pihak luar yang mempengaruhi program, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengurus desa, dan pihak ketiga seperti LSM,

Yayasan Sosial, dan Perguruan Tinggi. Sejalan dengan itu, Slamet dalam (Nurbaiti dan Bambang 2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan hanya dapat terjadi jika terpenuhi faktor-faktor yang mendukungnya. Faktor-faktor ini termasuk a) kesempatan, yaitu kondisi lingkungan yang dianggap memungkinkan orang untuk berpartisipasi; b) kemauan, yaitu sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk berpartisipasi, seperti manfaat yang dapat dirasakan akan partisipasi tersebut; c) Kemampuan, yakni adanya keteguhan yang dimiliki oleh masyarakat bahwa ia dapat berpartisipasi, baik secara pikiran, tenaga, waktu atau yang lainnya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Malik Ibrahim (2021) dengan judul “Peran Penyuluh Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program KB di Kota Parepare”. Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare dengan mengangkat isu mengenai bagaimana keberhasilan suatu program pembangunan yang dilakukan pemerintah, dalam program keluarga berencana tidak terlepas dari adanya keberhasilan peranan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menghasilkan bahwa ada beberapa program KB yang digunakan oleh penyuluh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, diantaranya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kunjungan ke rumah-rumah, serta memanfaatkan media yang ada untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, ada beberapa peran penyuluh keluarga berencana di kota Parepare diantaranya adalah sebagai pengelola pelaksana program KB, sebagai penggerak partisipasi masyarakat dan sebagai pemberdaya keluarga dan masyarakat.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Jusraini, dkk (2022) yang berjudul “Analisis peran Petugas Lapangan 'Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Jumlah Akseptor “MKJP” di Wilayah Kerja Puskesmas Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka Utara yang didasarkan dengan masih

banyaknya tuan rumah yang belum memahami cara menggunakan alat kontrasepsi MKJP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana hasil penelitian mengemukakan bahwa PLKB melakukan pendekatan secara formal dengan menetapkan dan memberikan informasi jadwal konseling kepada pasangan usia subur serta melakukan edukasi persuasif dan terbukti mampu meningkatkan jumlah akseptor KB. PLKB juga melakukan komunikasi secara langsung dengan berkunjung ke rumah- rumah warga baik yang menggunakan akseptor maupun tidak.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Nopiyanti (2019) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung keluarga berkualitas di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bonto Makkio untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat terkait program kampung KB yang awalnya merupakan kelurahan kumuh, padat penduduk, kurangnya pengetahuan pasangan usia subur mengenai alat kontrasepsi dan tingkat keikutsertaan KB yang masih rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan hasil dalam bentuk partisipasi pengambilan keputusan, pada keputusan awal masyarakat tidak ikut terlibat, akan tetapi masyarakat menghadiri musyawarah, forum dan memberikan saran serta keluhannya mengenai kampung KB, selanjutnya partisipasi dalam pelaksanaan masyarakat berkontribusi dalam bentuk dana dan menyiapkan sarana serta pemberian informasi dan menjadi peserta dalam setiap program. Yang terakhir, Partisipasi masyarakat dalam evaluasi masyarakat tidak dilibatkan secara langsung, namun mereka menilai dan memberikan saran apa saja yang kurang dalam program kampung KB tersebut.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Millati Hunafa (2023) yang berjudul “Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Upaya Pemberdayaan Keluarga di Desa Bulakan Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Banten”. Penelitian ini dilakukan di Desa Bulakan penelitian ini didasarkan pada peran PLKB sebagai seseorang yang merealisasikan tugasnya melalui program Pembangunan

Keluarga, pengendalian kependudukan, dan keluarga Berencana (Bangga Kencana). Penelitian ini menunjukkan bahwa PLKB memiliki peran yang cukup penting, diantaranya sebagai perencana, mengembangkan, bertanggung jawab dalam melaporkan berbagai kegiatan serta evaluasi. Pemberdayaan yang dilakukan oleh PLKB adalah melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Desa Bulakan membentuk kelompok UPPKS yang terdiri dari delapan anggota yang menjadi objek pembinaan PLKB Kecamatan Gunung Kencana. Produk yang dihasilkan oleh kelompok UPPKS Desa Bulakan ini adalah olahan singkong yaitu keripik singkong yang diolah sendiri oleh anggota UPPKS.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Malihah (2019) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung keluarga berkualitas (KB) di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Cilacap Jawa Tengah”. Penelitian ini dilakukan di Desa Binangun dengan didasari oleh rendahnya kualitas SDM serta adanya hambatan ekonomi dan tidak adanya sarana dan prasarana pendidikan terdekat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat harus dapat mengetahui tujuan dan manfaat dari program tersebut, karena dengan hal itu akan tumbuh kesadaran dari masing-masing individu untuk bisa berpartisipasi.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Miles dan Huberman dalam (Guntur, 2019) adalah suatu konsep yang sangat penting dalam menentukan pemisahan data yang diinginkan dan tidak diinginkan. Selain itu, Anselm L. Strauss dan Juliet M. Corbin dalam *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* menjelaskan bahwa kerangka konseptual merupakan suatu hal yang penting dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Selain itu, kerangka konseptual juga digunakan untuk mengembangkan suatu teori (Guntur, 2019).

Terdapat beberapa manfaat dengan adanya kerangka konseptual,

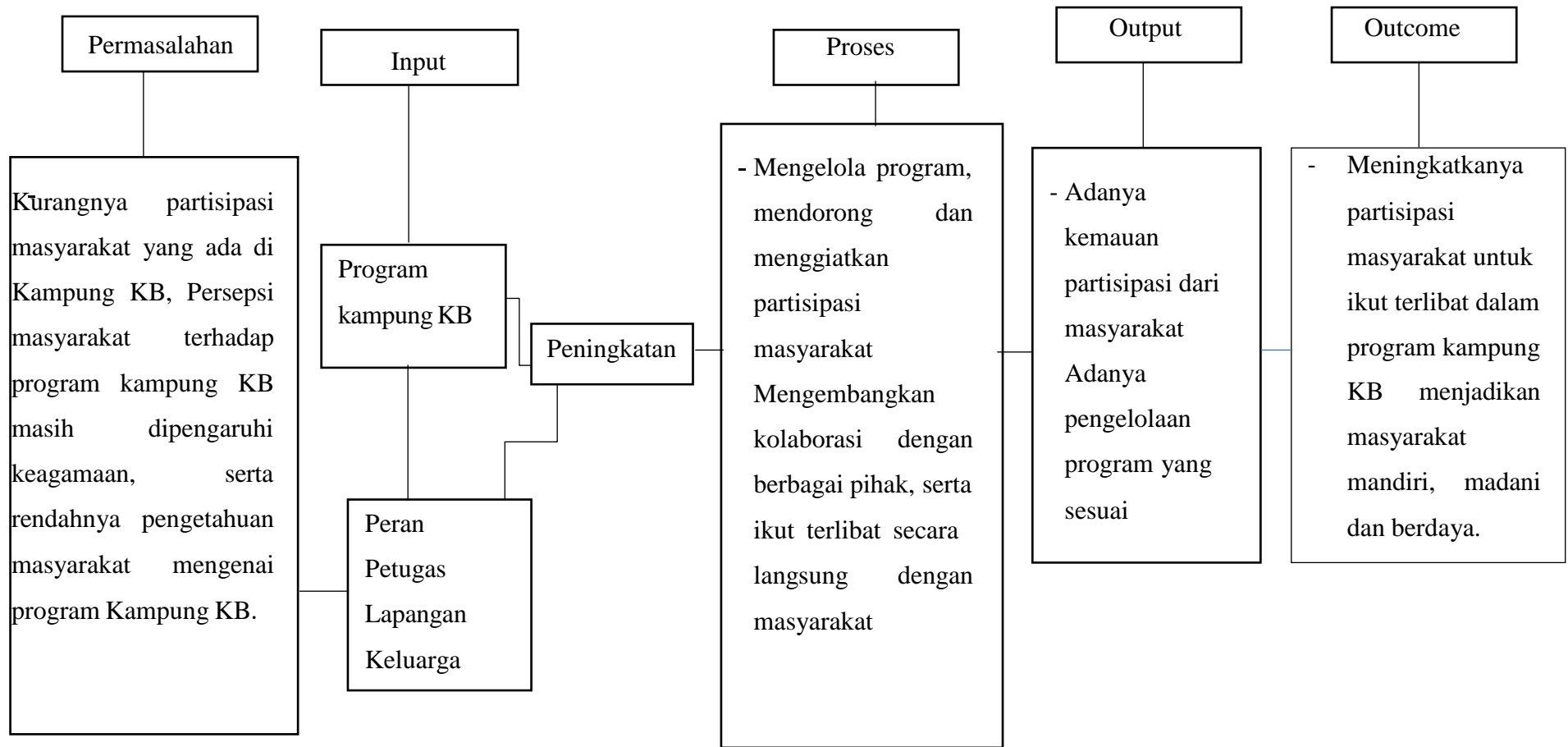
diantaranya adalah:

- 1) Mempermudah penyusunan hipotesis serta memiliki fokus dari minat penelitian yang layak untuk diuji.
- 2) Memudahkan untuk mengidentifikasi variabel penelitian.

Lester dalam (Guntur, 2019) menyebutkan bahwa kerangka konseptual disusun berdasarkan konsep tertentu dan bermakna untuk mengantisipasi bagaimana konsep-konsep berhubungan satu sama lain. Sejalan dengan pendapat Lester, Imenda dalam (Guntur, 2019) menyebutkan bahwa kerangka konseptual merupakan tujuan, fokus, dan inti dari setiap penelitian. Kerangka konseptual juga dapat mengidentifikasi metode yang digunakan peneliti untuk merumuskan masalah penelitian, menjalankan penelitian, dan menafsirkan informasi yang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual terdiri dari permasalahan, input, proses, output, outcome. Sedangkan judul penelitian yang diambil yaitu “Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Program Kampung KB (Studi: Kampung KB Sukapala, Kelurahan Gununggede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya).” Dimana, pada bagian permasalahan yaitu masih diperlukannya partisipasi yang lebih dari masyarakat, di Kampung KB, dengan persepsi masyarakat terhadap program kampung KB masih dipengaruhi keagamaan, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai program Kampung KB. Sedangkan pada bagian *input* penelitian adalah peran petugas lapangan keluarga berencana. Proses nya meliputi bagaimana PLKB dapat mengelola program, mendorong dan menggiatkan partisipasi masyarakat, mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat serta ikut terlibat secara langsung dengan masyarakat. *Output* yang dihasilkan ketika PLKB menjalankan peran nya untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya ialah adanya kemauan partisipasi dan peningkatan partisipasi dari masyarakatnya, sehingga diperoleh pengelolaan program yang sesuai.

Sedangkan *outcome* yang dihasilkan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam program kampung KB menjadikan masyarakat mandiri, madani dan berdaya.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka pertanyaan penelitian yakni: bagaimana peran petugas lapangan keluarga berencana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program kampung keluarga berkualitas?